

DETERMINASI DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA EKONOMI DAERAH: STUDI EMPIRIS KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAMBI

Sesraria Yuvanda^{1)*}, Muhammad Rachmad R²⁾, Faradilla Herlin³⁾

Prodi Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Jambi^{1,3)}

Prodi Ekonomi Pembangunan, Universitas Jambi²⁾

Email koresponden: sesraria@gmail.com

Abstrak

Meningkatnya kemandirian keuangan daerah berkorelasi dengan tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF). Oleh karena itu DDF perlu ditingkatkan melalui analisis faktor yang mempengaruhi DDF itu sendiri serta dampak DDF tersebut dalam kinerja ekonomi daerah. Penelitian ini lebih memfokuskan kepada analisis besaran DDF beserta faktor yang mempengaruhinya serta pengaruh DDF terhadap kinerja ekonomi daerah pada kabupaten/kota di provinsi Jambi. Model analisis yang digunakan model regresi berganda dan sederhana data penel. Hasil menunjukkan, DDF kabupaten /kota kategori masih sangat kurang sedangkan faktor yang signifikan mempengaruhi DDF adalah tingkat ketergantungan fiskal dan jumlah penduduk. DDF tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja ekonomi daerah.

Kata kunci : Desentralisasi, Fiskal, Kinerja, Ekonomi

Abstract

The enhancement of regional financial independence is closely related to the degree of fiscal decentralization (DDF). Therefore, it is important to improve DDF by analyzing the factors that influence it, as well as the impact of DDF on regional economic performance. This study focuses on analyzing the level of DDF, the factors affecting it, and its influence on regional economic performance in the regencies/municipalities of Jambi Province. The analytical model used is multiple and simple regression with secondary data. The results show that the DDF in the regencies/municipalities remains very low. The significant factors influencing DDF are the level of fiscal dependency and population size. Furthermore, DDF does not have a significant impact on regional economic performance.

Keywords : Decentralization, Fiscal, Performance, Economy

1. PENDAHULUAN

Dalam konteks keuangan daerah, tingkat kemandirian keuangan daerah merupakan indikator utama dalam melihat kinerja keuangan pada suatu daerah. Meskipun Pelaksanaan desentralisasi fiskal telah membuka peluang yang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam mengatur dan memanfaatkan sumber daya keuangan mereka secara mandiri., kenyataannya masih banyak daerah yang bergantung secara signifikan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Semakin meningkat derajat desentralisasi fiskal maka diharapkan akan berdampak positif terhadap perekonomian daerah yang bersangkutan (Thanh & Canh, 2020). Hal ini dikarenakan, semakin mandiri kondisi keuangan suatu daerah maka akan semakin leluasa pemerintahan daerah tersebut didalam membiayai program kegiatan prioritas dalam rangka meningkatkan perekonomian daerahnya (Yuvanda et al., 2023). Kondisi ini akan tercermin pada perbaikan beberapa indikator makro ekonomi daerah, seperti yang terlihat pada tingkat

pertumbuhan ekonomi, daya serap tenaga kerja, tingkat inflasi dan tingkat kemiskinan (Canavire-Bacarreza et al., 2020; Jilek, 2019).

Banyak faktor yang turut mempengaruhi derajat desentralisasi fiskal, diantaranya adalah jumlah penduduk, keragaman etnis, jumlah usia kerja, ketimpangan pendapatan, output/capita, ketergantungan sumber daya manusia dan ketergantungan dana transfer. Kesemua faktor tersebut akan dapat berpengaruh terhadap peningkatan derajat desentralisasi fiskal suatu daerah (Martinez-Vazquez & McNab, 2003). Selanjutnya berdasarkan penelitian (Hung & Thanh, 2022) di Vietnam, ketimpangan pendapatan mempunyai pengaruh terhadap derajat desentralisasi fiskal.

Atas dasar pemahaman yang demikian maka analisis berkenaan dengan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dan tingkat kinerja ekonomi dalam kaitannya dengan penyusunan model dan strategi peningkatannya, merupakan suatu hal yang menarik untuk ditelusuri. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar DDF kabupaten/kota, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi DDF tersebut serta menganalisis pengaruh DDF terhadap kinerja ekonomi daerah kabupaten/kota di provinsi Jambi.

2. KAJIAN PUSTAKA

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah secara otonom menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini berarti, daerah diberi hak dan wewenang untuk mengelola daerahnya sendiri, sesuai dengan kemampuan keuangannya. Dalam UU No. 32/2004 dinyatakan Desentralisasi adalah proses pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk menyelenggarakan dan mengelola urusan pemerintahan. Dengan kata lain, desentralisasi mencerminkan perpindahan tanggung jawab serta kekuasaan dari tingkat pusat ke tingkat daerah (Prihatiningsih et al., 2013). Sedangkan menurut (Devita et al., 2022) desentralisasi fiskal merupakan instrumen yang digunakan pemerintah guna mengelola pembangunan untuk mendorong perekonomian daerah dan nasional melalui mekanisme hubungan keuangan yang lebih baik guna tercipta kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.

Desentralisasi fiskal berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih demokratis. Tujuan ini dicapai melalui pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam hal pengeluaran anggaran, pemungutan pajak, serta penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat. (Azila-Gbettor et al., 2014). Dalam konteks pelaksanaan desentralisasi fiskal, kemampuan keuangan daerah menjadi aspek strategis yang tercermin dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD berperan sebagai indikator kemandirian fiskal daerah dan alat ukur ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, mendorong peningkatan PAD merupakan kebijakan penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mempercepat terwujudnya otonomi yang efektif dan berkelanjutan.

Dalam upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah maka diperlukan peningkatan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF). Ini berarti, Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) akan berkaitan dengan PAD dan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Searah dengan pemikiran untuk meningkatkan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), penelitian (Harliyani & Haryadi, 2016) tentang evaluasi kinerja keuangan daerah menyatakan bahwa

Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) menunjukkan tingkat kemampuan keuangan daerah yang tergolong tinggi, namun kondisi ini lebih disebabkan oleh tingginya transfer fiskal dari pemerintah pusat melalui mekanisme dana perimbangan. Realitas tersebut tidak sejalan dengan semangat otonomi daerah yang menekankan pentingnya kemandirian fiskal. Untuk menilai DDF secara lebih objektif, digunakan indikator rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah sebagai ukuran proporsional kontribusi PAD dalam struktur keuangan daerah.

Secara substansi, peningkatan DDF akan berkaitan dengan peningkatan PAD. Besaran pencapaian PAD yang tinggi akan mendorong peningkatan kemampuan keuangan daerah. Mendukung upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, (Muzdalifah, 2013) menyatakan kemampuan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dengan indeks kemampuan keuangan daerah rerata sebesar 0,51 yang berarti adanya otonomi daerah belum mampu mandiri secara keuangan. Dalam upaya meningkatkan kapasitas keuangan daerah, diperlukan strategi optimalisasi terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini mencakup pengelolaan yang efektif atas penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah, keuntungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta berbagai sumber pendapatan sah lainnya yang potensial untuk dikembangkan. (Yuvanda et al., 2024).

Semakin meningkatnya DDF maka diharapkan akan berdampak positif terhadap peningkatan kinerja ekonomi daerah. DDF mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya, termasuk terhadap kebutuhan investasi daerahnya. Sehingga diharapkan berimbas pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Bila perekonomian daerah mengalami pergerakan maka diharapkan juga disertai dengan peningkatan daya serap tenaga kerja dan penurunan tingkat kemiskinan.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode descriptive kuantitative yang dilengkapi dengan metode observasi. Guna menganalisis besaran Derajat Desentralisasi Fiskal maka dipakai model analisis berikut ini:

$$DDF_t = \frac{PAD_t}{TPD_t} \times 100\%$$

Dimana :

DDF_t = Derajat Desentralisasi Fiskal pada tahun ke t

PAD_t = Pendapatan Asli Daerah pada tahun ke t

TPD_t = Total Pendapatan Daerah pada tahun ke t

Untuk menganalisis faktor- faktor yang mempengaruhi derajat desentralisasi fiskal kabupaten kota di Provinsi Jambi digunakan **Model Analisis Regresi Berganda Data Panel** sebagai berikut :

$$DDF = \alpha_0 + \alpha_1 xTKF_{i1} + GR_{i2} + CAP_{i3} + \alpha_4 JP_{i4} + \alpha_5 TP_{i5} + e$$

Dimana:

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

TKF_{i1} = Tingkat Ketergantungan Fiskal

GR_{i2} = Ketimpangan Pendapatan

CAP_{i3} = Output/Capita

JP_{i4} = Jumlah Penduduk

TP₁₅ = Tingkat Pengangguran
e = error term
 α_0 = intercept
 $\alpha_{i1} - \alpha_{i5}$ = koefisien regresi

Selanjutnya untuk mengevaluasi pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap indikator kinerja ekonomi, digunakan model analisis regresi sederhana dengan data panel. dengan formulasi:

$$IKE_{it} = \alpha_{i1} + DDF_{it} + e$$

Dimana:

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal
IKE_{it} = Indikator Kinerja Ekonomi
e = error term
 α_{i1} = intercept

untuk menghitung IKE digunakan pula formulasi berikut ini

$$IKE = \frac{PEKO_{it} + (100 - INFL_{it}) + (100 - PGGR_{it}) + (100 - KMIS_{it})}{4}$$

Dimana :

PEKO_{it} = Pertumbuhan ekonomi yang dihitung dengan menggunakan PDRB harga konstan.
INFL_{it} = Besarnya inflasi yang mencerminkan tingkat kenaikan harga secara keseluruhan yang dihitung berdasarkan indeks harga konsumen.
PGGR_{it} = Angka Pengangguran yaitu persentase jumlah pengangguran terhadap total jumlah penduduk.
KMIS_{it} = Angka kemiskinan yaitu persentase jumlah orang miskin terhadap total jumlah penduduk.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Derajat Desentralisasi Fiskal kabupaten/kota di Provinsi Jambi

Bila dicermati hasil analisis yang telah dilakukan secara keseluruhan terhadap semua kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi maka terindikasi hampir semua kabupaten dan kota, kecuali Kota Jambi, memiliki Derajat Desentralisasi Fiskal kategori **sangat kurang**. Hal ini mengindikasikan **Pertama**, tingkat ketergantungan keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jambi masih sangat tinggi terhadap pemerintahan pusat. **Kedua**, rendahnya kemampuan keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jambi dalam melakukan optimalisasi penerimaan PAD. Besaran DDF masih rendah, berarti masih sangat rendahnya upaya pemerintah daerah daerah dalam memanfaatkan potensi PAD yang dimiliki daerah. Hal ini terindikasi dari masih rendahnya pemerintah kabupaten/kota dalam mencapai target PAD. Hanya pemerintah kota Jambi yang memperlihatkan upaya yang berhasil dalam meningkatkan PAD Kota Jambi. Untuk itu perlu upaya kebijakan pemerintah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Herlin et al., 2022), khususnya pada peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah serta pemanfaatan aset daerah. Hal ini juga sejalan dengan pendapat (Agustin et al., 2023; Basri et al., 2013) dimana kota Tangerang mampu meningkatkan PAD dengan cara mengaktifkan pajak dan retribusi daerah sehingga kota tersebut mendapat kinerja keuangan daerah kategori baik.

B. Faktor yang mempengaruhi Derajat Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai Probabilta F-hitung sebesar sebesar 0.000030. Dikarenakan nilai Probabilta F-hitung lebih kecil dari 10% berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari semua variabel independent terhadap variabel dependent. Dalam bentuk aplikatif, hasil tersebut memberi arti bahwa terdapat pengaruh yang significant secara bersama sama variabel tingkat ketergantungan fiskal, ketimpangan pendapatan, pendapatan perkapita, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terhadap derajat desentralisasi fiskal. Namun secara parsial hanya variabel tingkat ketergantungan fiskal dan jumlah penduduk yang memberikan pengaruh signifikan terhadap derajat desentralisasi fiskal. Ini menjelaskan bahwa kabupaten/kota di provinsi Jambi mempunyai Pendapatan Asli Daerah yang masih kecil kecuali kota Jambi. Kondisi ini memperlihatkan ketergantungan pada dana transfer dari pusat atau APBN sangat tinggi. Ini sejalan dengan (Jilek, 2019) bahwa sentralisasi yang lebih tinggi mungkin merupakan pilihan politik untuk tetap mengontrol berbagai daerah melalui transfer antar pemerintah, sehingga mencegah kemungkinan pemisahan diri.

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Random Effect Model Pada Model Determinat Derajat Desentralisasi Fiskal

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1344.697	287.3385	-4.679834	0.0000
TKF?	13.35145	2.863321	4.662924	0.0000
GR?	2.370369	11.82618	0.200434	0.8420
CAP?	2.97E-05	4.78E-05	0.622067	0.5368
JP?	2.63E-05	7.71E-06	3.415399	0.0013
TP?	0.399019	0.376296	1.060387	0.2942
R-squared	0.431418	Mean dependent var		2.645367
Adjusted R-squared	0.373400	S.D. dependent var		3.020555
S.E. of regression	2.391014	Sum squared resid		280.1304
F-statistic	7.435866	Durbin-Watson stat		2.910054
Prob(F-statistic)	0.000030			

Sumber: Data diolah

Adapun nilai nilai koefisien determinasi (R-squared) sebesar 0.4314 atau sebesar 43,14%. Artinya besaran variasi perubahan variabel derajat desentralisasi fiskal mampu dijelaskan oleh variasi perubahan variabel tingkat ketergantungan fiskal, ketimpangan pendapatan, pendapatan perkapita, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran sebesar 43,14 persen. Sedangkan sisanya sebesar 56,86 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Ada 3 variabel yang tidak signifikan adalah ketimpangan pendapatan (GR) pada P = 0.8420 Output/Capita (Cap) pada P = 0.5368 dan tingkat pengangguran (TP) pada P = 0.2942. Secara makro ketiga variabel tersebut tidak signifikan pengaruhnya terhadap DDF karena ketiga variabel tersebut berperan tidak langsung terhadap kinerja keuangan daerah. Menurut (Lestari, 2016), hubungan antara desentralisasi dan ketimpangan pendapatan masih menunjukkan hasil yang kurang jelas atau tidak begitu kuat. Variabel yang berperan langsung dalam DDF adalah PAD. Oleh karena itu, untuk meningkatkan PAD maka perlu

upaya meningkatkan sumber-sumber penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah, laba BUMD dan optimalisasi pemanfaatan asset daerah.

C. Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Ekonomi

Untuk melihat pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi, secara partial akan dilakukan pengujian t statistik. Berdasarkan pengujian t statistic diketahui nilai Prob sebesar 0.95. Ini berarti, nilai probabilita lebih besar dari 0,10. Temuan ini mengindikasikan bahwa variabel Derajat Desentralisasi Fiskal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja ekonomi. Kondisi ini semakin menguatkan fakta bahwa ketika derajat desentralisasi fiskal di kabupaten/kota berada pada tingkat yang kurang optimal, hal tersebut tidak memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Perekonomian kabupaten/kota di Provinsi Jambi lebih dominan distimulus oleh pelaku ekonomi diluar anggaran pemerintah, yang seharusnya berperan sebagai stimulus fiskal. (Hidayat & Herlin, 2019) menyatakan bahwa peran pemerintah dalam mengalokasikan pengeluaran pemerintah dan swasta akan berpengaruh positif terhadap tingkat Desentralisasi Fiskal.

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Random Effect Model Pada Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap IKE

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.485780	3.241025	2.309695	0.0248
DDF?	-0.032181	0.586638	-0.054857	0.9565
R-squared	0.000058	Mean dependent var	2.175141	
Adjusted R-squared	-0.018809	S.D. dependent var	2.900045	
S.E. of regression	2.927192	Sum squared resid	454.1279	
F-statistic	0.003048	Durbin-Watson stat	2.928250	
Prob(F-statistic)	0.956182			

Sumber: data diolah

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa.:

1. Derajat desentralisasi fiskal kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada tingkatan sangat kurang kecuali kota Jambi.
2. Faktor tingkat ketergantungan fiskal dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap derajat desentralisasi fiskal sedangkan faktor ketimpangan pendapatan, output perkapita dan tingkat pengangguran tidak signifikan pengaruhnya terhadap derajat desentralisasi fiskal kabupaten/kota di Provinsi Jambi.
3. Derajat desentralisasi fiskal tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kinerja ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jambi

Saran

Usaha penguatan Derajat Desentralisasi Fiskal sebaiknya difokuskan pada penguatan kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini terutama dapat dicapai dengan mengoptimalkan pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah, serta peningkatan pemanfaatan aset-aset milik daerah yang potensial. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan akan memperluas kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai fungsi pembangunan. Selain itu, penting pula untuk mendorong

peningkatan indikator kinerja ekonomi daerah secara menyeluruh, sebagai prasyarat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, desentralisasi fiskal tidak hanya menjadi instrumen pengelolaan keuangan, tetapi juga menjadi pendorong nyata bagi kemajuan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, S., Armeliza, D., & Nasution, H. (2023). Analisis Kinerja Keuangan dan Kontribusinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat pada Pemerintah Kota Tangerang. *SINOMIKA Journal*, 2(3), 493–510.
- Azila-Gbettor, E. M., Adjimah, H. P., & Tibu, S. K. (2014). Fiscal decentralization and poverty reduction: Citizens view. *Journal of Social Economics Research*, 1(6), 118–128.
<https://archive.conscientiabeam.com/index.php/35/article/view/1300%0Ahttps://archive.conscientiabeam.com/index.php/35/article/download/1300/1823>
- Basri, H., Syaparuddin, S., & Junaidi, J. (2013). Pemetaan Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 1(2), 81–90.
<https://doi.org/10.22437/ppd.v1i2.1497>
- Canavire-Bacarreza, G., Martinez-Vazquez, J., & Yedgenov, B. (2020). Identifying and disentangling the impact of fiscal decentralization on economic growth. *World Development*, 127, 104742. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104742>
- Devita, A., Handra, H., & Yonnedi, ; Efa. (2022). Kemampuan fiskal daerah Provinsi Jambi Studi Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah). *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(3), 2085–1960.
- Harliyani, E. M., & Haryadi, H. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 3(3), 129–140.
<https://doi.org/10.22437/ppd.v3i3.3514>
- Herlin, F., Rachmad, M., Zamzami, Z., Safri, M., & Yacob, S. (2022). Improvement strategy for regional financial performance affecting macroeconomics in regency/city in Jambi province. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478)*, 11(8), 401–408. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i8.2169>
- Hidayat, M. S., & Herlin, F. (2019). Fiscal decentralization and its impact on industrial development in Jambi Province. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 7(3), 297–304. <https://doi.org/10.22437/ppd.v7i3.8493>
- Hung, N. T., & Thanh, S. D. (2022). Threshold effects of fiscal decentralization on income inequality: Evidence from Vietnam. *Cogent Business and Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2111851>
- Jilek, M. (2019). Fiscal Decentralization and Economic Integration in Europe. *Proceedings of the 23rd International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2019*, N-26/1997(April). <http://kvf.vse.cz/wp-content/uploads/2013/11/TPAVF-2017-final.pdf#page=54>
- Lestari, A. (2016). Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pedapatan Dan Desentralisasi Di Indonesia. *Kinerja*, 20, No.1, 53–68.
- Martinez-Vazquez, J., & McNab, R. M. (2003). Fiscal decentralization and economic growth. *World Development*, 31(9), 1597–1616. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(03\)00109-8](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(03)00109-8)
- Muzdalifah. (2013). Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tabalong dalam Otonomi

- Daerah. *Ekonomi Dan Bisnis*, 6(1), 1–10.
- Prihatiningsih, A., Rachmad R, M., & Syamsuddin. (2013). Defisit Anggaran dan Implikasinya terhadap Perkembangan Ekonomi dan Kinerja Keuangan Kabupaten Tebo. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 1(2), 97–108. <https://doi.org/10.22437/ppd.v1i2.1499>
- Thanh, S. D., & Canh, N. P. (2020). Fiscal Decentralization and Economic Growth of Vietnamese Provinces: the Role of Local Public Governance. *Annals of Public and Cooperative Economics*, 91(1), 119–149. <https://doi.org/10.1111/apce.12255>
- Yuvanda, S., Rachmad, M., & Herlin, F. (2023). Dampak Dana Perimbangan Terhadap Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Journal Development*, 11(2), 90–96. <https://doi.org/10.53978/jd.v11i2.310>
- Yuvanda, S., Rachmad, M., & Jakfar, M. (2024). Dampak Berlakunya Kebijakan UU No 1 Tahun 2022 tentang HKPD terhadap Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dan Upaya Peningkatannya di Kabupaten Bungo. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 13(04), 1347–1354.